

Menafsirkan Papua (Lebih) Emansipatif dan Reflektif: Perspektif Antropologi

I Ngurah Suryawan

Antropologi Sosial, Universitas Papua

Abstrak

Artikel ini mewacanakan bagaimana perspektif antropologi dalam menafsirkan Papua secara lebih emansipatif. Emansipatif dalam konteks ini adalah mewacanakan dinamika perubahan sosial yang terjadi di Papua secara kritis dengan berbagai kompleksitas dan "keterpecahannya". Oleh sebab itulah perspektif antropologi yang kritis dan reflektif menjadi aktual menjadi pijakan dalam memahami kerumitan persoalan yang terjadi di Papua. Antropologi kritis memeriksa proses pemaknaan yang berlangsung dalam pembentukan budaya Papua selama ini. Perspektif reflektif berhubungan dengan persoalan metodologis dalam studi antropologi yang melihat orang Papua sebagai subjek yang terus bergerak, berubah, dan secara terus-menerus mengkonstruksi identitas dan kebudayaannya. Perspektif ini membangun makna dan pengetahuan secara bersama-sama sehingga menghasilkan proses belajar bersama-sama pula. Dengan demikian, selain menumbuhkan kesadaran kritis masyarakat, antropolog juga ikut merubah dirinya sebagai proses refleksi terus-menerus.

Kata Kunci: menafsirkan, emansipatif, perspektif, antropologi, reflektif, etnografi, kesadaran kritis

Abstract

This article discussing how anthropological perspective in interpreting the Papua more emancipatory. Emancipatory in this context is discussing dynamics of social change that occurred in Papua critically with various complexities and their "disunity". That is why a critical anthropological perspective and reflective be actual become a based in understanding the complex issues in Papua. Critical anthropology meaning checking process which takes place in the formation of the culture of Papua during this time. Reflective perspective related to methodological issues in the study of anthropology who see Papuans as a subject that is constantly moving, changing, and constantly construct of identity and culture. This perspective construct meaning and knowledge together to produce learning together anyway. Thus, in addition to foster critical awareness of society, the anthropologist also transform themselves as a continuous process of reflection.

Keywords: *Interpretif, Emancipatory, Perspective, Anthropology, Reflective, Ethnography, Critical consciousness.*

Pengantar

Seorang *paitua* (bapak) yang sudah mulai ringkih berjalan menjinjing map berwarna merah baru saja turun dari mobilnya. *Paitua* itu mendekati saya dan sejak itu ia seolah tidak berhenti bercerita tentang rencana pemekaran wilayahnya. Ia yang sebelumnya adalah pejabat daerah di sebuah kabupaten di Papua Barat mengungkapkan akan memperjuangkan pemekaran wilayah di kampungnya dan sebagian besar wilayah lainnya. Alasannya sederhana, “Agar masyarakat *dong* merasakan langsung dana-dana dari pemerintah. Dengan demikian kesejahteraan mereka pun akan meningkat dengan sendirinya,” ungkapnya lugas. Selain pemekaran distrik, yang ada dalam pikirannya sekarang adalah pemekaran kabupaten-kabupaten dan provinsi baru di wilayah kepala burung Tanah Papua.

Paitua ini kemudian merinci bahwa jika ada orang dan daerah yang belum puas, ia bisa mengajukan pemekaran. Misalnya ada etnik yang merasa belum diakomodasi, ia bisa mengajukan pemekaran wilayahnya menjadi kabupaten definitif. “Tentu *dong* (mereka) harus berjuang juga, jangan terima jadi saja,” jelasnya. Perjuangan yang dimaksud *paitua* ini adalah memobilisasi dukungan di masyarakat, bekerja sama dengan anggota dewan dan pejabat bupati

induk agar memberikan izin dan merekomendasikan pemekaran tersebut. Singkatnya, bagaimana membuat dukungan pemekaran tersebut menjadi kuat dan betul-betul diperjuangkan oleh para pejabat agar terealisasi.

Pemecahan wilayah melalui pemekaran seperti ilustrasi di atas jamak terjadi di Papua. Para birokrat di sebuah provinsi misalnya, akan memikirkan dan menoleh kampungnya untuk dimekarkan. Peralihan aparat birokrat agar mendapatkan posisi yang lebih “terhormat” di wilayahnya sendiri juga terjadi. Arus migrasi birokrat menjadi sebuah fenomena yang tak terbantahkan. Ujungnya adalah jaringan etnik dan kekeluargaan yang menjadi salah satu basis kuat dari desain pemekaran sebuah wilayah. Tentu persoalannya tidak sesederhana demikian. Polarisasi di internal etnik di Papua juga terbukti menjadi pemicu dari rencana pemekaran daerah.

Selain migrasi penduduk pendatang yang selalu dikhawatirkan dari pemekaran daerah, migrasi birokrat dan perebutan posisi-posisi jabatan pemerintahan merupakan perdebatan yang tidak berujung-pangkal dari sebuah daerah operasional baru, hasil pemekaran daerah. Pengalaman saya menyaksikan bagaimana para birokrat berkumpul untuk merebut hak jabatan di daerah pemekaran menggambarkan semuanya. Suatu hari di pertengahan Februari 2013. Di halaman sebuah ruang pertemuan

besar di pusat kota Distrik Ransiki tampak sesak dengan puluhan warga. Beberapa warga juga berkumpul di “mata jalan” (pinggir jalan) sebuah gereja megah yang berhadapan dengan gedung pertemuan distrik. Di dalam ruangan, kursi-kursi plastik sudah diatur memenuhi ruangan. “*Tong* (kita) harus bicarakan ini baik-baik. ‘Barang’ (pemekaran daerah) ini datang untuk *tong* semua, jangan sampai orang-orang kabupaten duduk-duduk *baku atur* (saling mengatur) urus ‘barang’ yang *tong* punya,” ujar seorang *paitua* (orang tua) berbaju batik Papua biru sambil mengunyah sirih pinang. *Paitua* ini adalah salah seorang guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mempunyai hak ulayat di daerah pemekaran itu.

Para PNS yang berasal dari keseluruhan distrik tersebut telah membentuk sebuah tim untuk menyerap aspirasi masyarakat dalam pengaturan posisi-posisi birokrasi di kabupaten baru ini. Sebagian besar dari mereka adalah para PNS yang bertugas di berbagai dinas di kabupaten induk yang berbondong-bondong ingin menempati jabatan di kabupaten baru. “*Kitong* para PNS *ni* harus menjadi tuan di *kitong pu* tanah. Jangan bawa orang dari luar. *Tong* juga *tra tau* (tidak tahu), *dong* (mereka) mau *kah* tidak? *Nan tong tra* (Nanti kita tidak) dapat bagian lagi,” ujar seorang PNS menyambung pertemuan siang itu.

Suasana menjadi tegang dan memanas ketika pimpinan rapat

mulai mendata nama-nama PNS yang pantas untuk dipromosikan menempati jabatan di kabupaten baru tersebut. “*Tong* hanya berharap PNS-PNS yang memang ‘anak tanah’ ini bisa menikmati pemerintahan baru yang terdapat di tanah kita sendiri. Jangan semua jabatan-jabatan penting dipegang oleh orang luar dan *tong* menjadi penonton. *Tong* harus menjadi pelaku di daerah pemekaran ini. *Kitong pu* (kita punya) tanah yang sekarang jadi ‘barang ini’ (pemekaran daerah),” katanya disambut oleh tepuk tangan warga dalam ruang pertemuan.

Fragmen etnografis di atas hanyalah salah satu di antara banyak fenomena kebudayaan yang hingga hari ini masih menjadi isu ekonomi politik yang panas di Tanah Papua. Nah, bagaimana perspektif kebudayaan (antropologi) membaca isu ini? Dalam konteks yang lebih luas, bagaimana menafsirkan kompleksitas kebudayaan yang terjadi di Papua hingga hari ini? Antropologi sebenarnya ditunggu peranannya dalam upaya memahami dinamika kebudayaan ini. Pertanyaan berikutnya adalah dengan metodologi atau perspektif kebudayaan seperti apa yang semestinya dipergunakan dalam upaya melantunkan penafsiran terhadap dinamika sosial budaya yang terjadi di Papua? Artikel ini akan membicarakan bagaimana perspektif antropologi dalam menafsirkan Papua secara lebih emansipatif dari pada yang selama

ini dilakukan dalam kajian-kajian tentang Papua.

Akumulasi Pengetahuan Papua (Seperti Bagaimana?)

Akumulasi pengetahuan tentang Papua hingga hari ini melimpah-ruah jumlahnya. Hasil-hasil penelitian dan reproduksi pengetahuan yang terlahir dengan menggunakan Papua sebagai “objek” sudah tak terhitung lagi. Tumpukan laporan penelitian, skripsi, tesis, disertasi, dan pemetaan kondisi sosial budaya menjadi harta yang tak ternilai harganya dalam memahami dan menafsirkan Papua. Namun, persoalannya adalah bagaimana tumpukan akumulasi pengetahuan tersebut berguna bagi rakyat Papua untuk dapat “mengerti dirinya sendiri” dan terlibat sebagai subjek dalam perubahan sosial yang terjadi di tanahnya sendiri.

Persoalan relasi ilmu pengetahuan dan masyarakat memang menjadi perdebatan yang tidak ada habisnya. Ujung dari perdebatan itu adalah terletak pada paradigma ilmu pengetahuan tersebut yang melihat masyarakat sebagai “sumber pengetahuan.” Menempatkan manusia sebagai subjek dalam proses transformasi sosial budaya yang berlangsung di Papua khususnya adalah salah satu perspektif berpikir dalam studi kebudayaan. Perspektif emansipatoris yang transformatif mengacu kepada bagaimana ilmu-ilmu humaniora menggunakan

ilmunya secara “berpihak” menjadi mediasi menyadarkan serta meyakinkan masyarakat untuk mengambil peran dalam perubahan sosial. Kata kuncinya adalah kesadaran untuk berpartisipasi dan mengambil peran aktif dalam proses perubahan sosial budaya.

Sudah puluhan tahun program pembangunan hadir di tengah masyarakat Papua. Perubahan perlahan mulai dirasakan menyangkut lingkungan fisik berupa bangunan-bangunan fasilitas publik seperti jalan, sekolah, Puskesmas pembantu (Pustu) di kampung-kampung. Pembangunan fisik yang mencolok terlihat adalah gedung-gedung pusat pemerintahan di tingkat kabupaten maupun distrik yang mulai menerabas hutan dan tanah-tanah ulayat milik masyarakat. Namun, semua itu terjadi karena adanya bantuan berjumlah triliunan rupiah, baik itu dari pemerintah pusat Indonesia di Jakarta, melalui Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Papua dan Papua Barat maupun program-program bantuan dari lembaga luar negeri. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah dengan adanya berbagai macam bantuan tersebut telah membuat masyarakat Papua menjadi berinisiatif untuk merubah diri dan kehidupannya ke depan? Di sinilah letak persoalannya kemudian.

Sudah menjadi kelumrahan jika dalam memandang, “membaca”, mencitrakan, dan menganalisis Papua sebagai masyarakat “terkebelakang”, “kurang beradab”

dan sejumlah kesan minor lainnya karena sederetan kisah tentang gizi buruk, “perang suku”, dan kekurangmajuan mereka dibandingkan dengan daerah Indonesia di bagian barat. Pembacaan ini dari perspektif yang mempengaruhinya sudah mengalami permasalahan yang sangat akut dan serius. Permasalahannya adalah menempatkan bahwa yang memandang Papua merasa dirinya lebih “berkuasa” dan beradab dibandingkan masyarakat Papua secara umum. Ini adalah cikal bakal dari pandangan kolonialistik dan penaklukan (baca: penjajahan). Pembacaan ini lebih mengundang permasalahan daripada menemukan solusi dalam menghadapi kompleksitas persoalan Papua.



Gambar 1.

Salah satu potret mama-mama Papua di Pasar Momowaren di Distrik Distrik Momiwaren, Kabupaten Manokwari Selatan, Provinsi Papua Barat (Foto: I Ngurah Suryawan)

Realitas berbagai persoalan yang terdapat di Papua harus dilihat secara holistik, komprehensif dan berperspektifkan empati yang emansipatoris. Ide dari pendekatan ini adalah melihat kompleksitas persoalan Papua dengan menggali latar belakang per-masalahan, tidak menyalahkan tapi membangun solusi bersama. Setelah itu menempatkan masyarakat Papua sebagai subjek dan menggerakkan mereka untuk berperan secara aktif dan merubah dirinya sendiri. Caranya adalah menggugah kesadaran mereka tentang kondisi Papua dan tanah kelahirannya kini dan menggantungkan harapan-harapan pembaruan kepadanya.

Dengan menggunakan perspektif emansipatoris dan transformatif, masyarakat Papua akan merasa dirinya menjadi bagian dari perubahan besar yang terjadi di Papua, bukan malah sebagai penonton seperti kecenderungan yang terjadi selama ini. Argumentasi ekonomi politik sebagai basis dari pandangan modernisme (kemajuan) mendasarkan kemajuan diukur dari pembangunan ekonomi dan stabilitas politik. Dasar pemikiran inilah yang dominan selama ini mempengaruhi cara pandang dan pembacaan terhadap Papua, sehingga fenomena pemekaran digalakkan sedemikian rupa dengan alasan untuk memajukan Papua dari kemiskinan, ketertinggalan, dan sebagai aspirasi politik budaya masyarakat Papua. Kemiskinan dan

ketertinggalan adalah basis dari argumentasi ekonomi, sedangkan aspirasi politik etnik/suku bangsa di Papua adalah basis untuk menjaga stabilitas politik.

Dengan demikian, apa yang sebenarnya terjadi dalam studi-studi kebudayaan selama ini tentang Papua? Jika merujuk bahwa salah satu kontribusi ilmu pengetahuan di tengah masyarakat adalah menginspirasi perubahan sosial untuk kemaslahatan masyarakat yang selama ini tersingkirkan dan dikalahkan. Senjata ilmu pengetahuan sepatutnya memberikan gambaran dan arah tentang berbagai fenomena yang terjadi di tengah masyarakat. Selain memberikan analisis, ilmu pengetahuan juga sepatutnya memberikan penafsiran dan prediksi tentang situasi yang akan terjadi ke depan. Nah, salah satu bidang yang penting tersebut adalah analisis dan penafsiran dalam bidang kebudayaan, yang nantinya sangat berguna untuk memberikan refleksi sekaligus bimbingan ke arah mana kebudayaan masyarakat akan bergerak.

Studi kebudayaan inilah yang menjadi perhatian antropologi, salah satu ilmu-ilmu humaniora yang menaruh perhatian kepada proses-proses pembentukan (konstruksi) dan signifikasi (pemaknaan) kebudayaan di tengah masyarakat. Tentu saja perspektif (cara pandang) dalam memahami kebudayaan berbagai macam dan berbagai studi kebudayaan telah banyak dihasilkan

sesuai dengan cara pandang tersebut. Totalitas antropologi dalam menuliskan fenomena kebudayaan itulah yang dinamakan etnografi. Di sinilah titik perdebatannya. Perdebatannya bukan hanya persoalan perspektif, namun lebih ke dalam lagi, yaitu mengenai bagaimana etnografi bisa menginspirasi atau menstimulasi (merangsang) inisiatif perubahan di tengah masyarakat. Perubahan yang dimaksudkan pada tataran pemaknaan dari fenomena yang terjadi dan juga kesadaran yang tercipta di tengah masyarakat. Untuk mencapai tujuan inilah diperlukan relasi yang intim guna menautkan (menghubungkan) antropologi dan transformasi sosial budaya yang bergerak di tengah masyarakat.

Dalam tradisi studi kebudayaan klasik yang dipopulerkan oleh “Bapak Antropologi Indonesia”, Koentjaraningrat, berkembang “dogma” tentang tujuh unsur kebudayaan yang meliputi: sistem pengetahuan, religi/agama, kesenian, teknologi, bahasa, organisasi sosial dan kekerabatan, sistem ekonomi/mata pencaharian hidup. Pendeskripsian ketujuh unsur kebudayaan ini pernah menjadi kegandrungan dalam studi kebudayaan yang masih berlangsung hingga kini. Jurusan-jurusan antropologi berbagai universitas di Indonesia masih menggunakan metode tujuh unsur kebudayaan ini dalam

memperkenalkan kajian-kajian awal dari ilmu antropologi.

Akumulasi pengetahuan dan penggambaran etnografi kelompok masyarakat berdasarkan tujuh unsur kebudayaan menjadi hal yang “sederhana” dan paling berguna untuk penggambaran awal “kebudayaan etnik” yang bisa dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dan kekuasaan. Ahimsa-Putra (1987:27) mengungkapkan studi-studi etnografi yang mengikuti pandangan tujuh unsur kebudayaan universal bermaksud untuk memudahkan para peneliti memanfaatkannya dalam studi perbandingan kebudayaan (*cross-cultural*). Melalui studi perbandingan yang semacam ini diharapkan akan dapat dicapai rumusan-rumusan yang sedikit banyak menyerupai “hukum-hukum” atau “dalil” tentang fenomena sosial-budaya. Epistemologi yang ada di balik pemikiran semacam ini adalah epistemologi yang positivistik.

Studi perbandingan kebudayaan inilah yang memunculkan perspektif studi kebudayaan yang melokalisir kebudayaan pada wilayah tertentu. Hal ini tentu salah kaprah karena kebudayaan sifatnya adalah cair melampaui ruang dan terus-menerus berubah melampaui pembatasan-pembatasan. Paradigma positivistik yang menganggap kebudayaan sebagai benda dan nilai-nilai yang kokoh, ajeg yang tidak berubah, beresiko gagal menangkap dinamika

dan perubahan dalam kebudayaan tersebut.

Nah, jika studi kebudayaan Papua khususnya terus-menerus menggantung diri pada perspektif ini, bukan tidak mungkin kajian kebudayaan Papua yang kritis dan transformatif tidak akan pernah terjadi. Studi kebudayaan Papua akan macet, tidak berkembang secara dinamis dan kritis. Justru yang terjadi adalah involusi (pengulangan) dan pengkerdilan kebudayaan Papua karena kegagalan memahami perspektif emansipatif yang kritis dan transformatif. Dengan kata lain, kebudayaan Papua yang terus-menerus berubah sepatutnya dipahami dan dianalisis dengan perspektif yang merekognisi (mengakui) kehadiran rakyat Papua sebagai subjek (bukan objek, korban) dari perubahan sosial yang terjadi di tanah mereka.

Etnografi dan Akulturasi Kebudayaan

Kekayaan data-data etnografi Papua, melalui tulisan ilmiah ataupun laporan-laporan pemetaan kebudayaan, adalah modal penting dalam melakukan pengelolaan kebudayaan secara lebih lanjut dan partisipatif. Data-data etnografi tersebut, meskipun masih sangat sederhana dan terkesan dominan melakukan simplifikasi (penyederhanaan) adalah data awal yang tidak bisa diabaikan. Namun, data awal itu harus dilanjutkan dengan *revisiting* (mengunjungi

kembali) untuk melakukan pembaruan data-data kontemporer tentang Papua. Hal selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menganalisis dan melakukan penafsiran tentang situasi kontemporer yang terjadi dan langkah-langkah dalam pengelolaan kebudayaan yang merekognisi (mengakui) masyarakat Papua.

Bagian awal yang perlu diperhatikan adalah mengkritisi sebagian besar gambaran etnografi tentang Papua yang masih menggunakan perspektif tujuh unsur kebudayaan.

Akumulasi pengetahuan yang tercipta dari penggambaran etnografi kelompok masyarakat berdasarkan tujuh unsur kebudayaan menjadi hal yang "sederhana" dan paling berguna untuk penggambaran awal "kebudayaan etnik" tersebut. Oleh rezim kolonial, gambaran etnografi suku bangsa inilah yang dipergunakan untuk modal awal melakukan penjajahan. Oleh rezim "pembangunanisme", data etnografi ini dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan kekuasaan, seperti Operasi Militer, Operasi Koteka, dan usaha-usaha eksploitasi sumber daya alam dan manusia yang ada di Tanah Papua.

Studi-studi yang sangat positivistik - kebudayaan dipandang statis, kaku, dan tidak berubah – itu tentu saja masih sangat berguna sebagai gambaran awal, meskipun sebagian besar data-datanya akan terkesan sangat "meromantisir" Papua sebagai wilayah budaya yang eksotik dan statis. Namun, kita

sudah mendapatkan data awal yang lebih dari cukup dalam memberikan gambaran awal tentang Papua. Akan tetapi, tentu saja itu tidak cukup. Sangat diperlukan usaha untuk menafsirkan dan menganalisis kondisi Papua yang tidak lagi bisa dilokalisir dan eksotik. Realitas Papua adalah wilayah yang sedari dulu tersentuh atau berinteraksi dengan dunia global. Hal ini dibuktikan dengan kontak-kontak kebudayaan dengan para pedagang dan pelaut dari Ternate, Tidore ataupun dari luar negeri. Oleh karena itulah kebudayaan Papua juga berjalan dinamis seiring kontak budaya dengan para pendatang yang berlangsung tanpa henti ke Tanah Papua.

Pada momen inilah pengelolaan kebudayaan dimulai dengan memikirkan perubahan kebudayaan yang ditimbulkan dari persentuhan budaya Papua dengan budaya luar (global) yang hadir dan berkembang di Tanah Papua. Pengelolaan kebudayaan itu berhubungan dengan keseharian masyarakat terkait dengan mengatasi perbedaan-perbedaan, lebih tepatnya dalam mengelola properti-properti kebudayaan yang berbeda-beda. Seperti diungkapkan Koentjaraningrat (1959:139;173-174) bahwa kebudayaan kita berubah dan terus akan berubah. Dari perspektif antropologi, peristiwa-peristiwa perubahan kebudayaan dipandang sebagai akulturasi/perubahan kebudayaan, yaitu proses ketika budaya-budaya tempatan di

Indonesia secara kreatif terlibat dalam mengkonstruksi identitas (Indonesia): dialektika “dunia lama” dan “dunia baru” yang menghasilkan keberagaman masyarakat (“jiwa baru” bangsa), termasuk di dalamnya kebudayaan Papua yang mau tidak mau terlibat di dalamnya.

Pengelolaan kebudayaan bagi kondisi yang heterogen dan kompleks, seperti terjadi di Papua dan daerah lain di Indonesia, membutuhkan kecermatan terutama memahami cair dan dinamisnya konsep mengenai kebudayaan tersebut. Kebudayaan itu berkaitan-kelindan dengan proses sejarah, yang kecenderungannya bergantung pada tanggapan individu dan sosial terhadap keserbamungkinan yang didedahkan oleh perubahan yang ada baik secara alami maupun politis-sosiologis. Perubahan yang ada juga cenderung mengancam kebhinneka-an akibat dari penetrasi ketunggalan dari kebijakan dan praktik politik serta kelimpahruahan pengetahuan dan informasi yang ditebarkan media (massa) baru. Kebudayaan itu tanggap terhadap tantangan perubahan dari luar, melawan seperlunya sambil memantas-mantaskan atau mengapropriasi apa yang asing menjadi bagian dari dirinya (Laksono, 2011).

Keseluruhan perspektif di atas berhubungan dengan cara mengelola kebudayaan yang emansipatif dan merekognisi heterogenitas etnik di Tanah Papua. Kebudayaan itu begitu kompleks

penuh perubahan sehingga butuh penyederhanaan. Kebudayaan itu juga pada dasarnya laten dan tidak kasat mata. Kebudayaan itu berkaitan-kelindan dengan proses sejarah, yang kecenderungannya bergantung pada tanggapan individu dan sosial terhadap keserbamungkinan yang didedahkan oleh perubahan yang ada baik secara alami maupun politis-sosiologis. Perubahan yang ada juga cenderung mengancam kebhinneka-an akibat dari penetrasi ketunggalan dari kebijakan dan praktik politik serta kelimpahruahan pengetahuan dan informasi yang ditebarkan media (massa) baru. Kebudayaan itu tanggap terhadap tantangan perubahan dari luar, melawan seperlunya sambil memantas-mantaskan atau mengapropriasi apa yang asing menjadi bagian dari dirinya.

Tantangan pengelolaan kebudayaan di tengah penetrasi politik dan fragmentasi (keterpecahan) di dalam masyarakat adalah menautkan (menghubungkan) pengelolaan kebudayaan dengan pendidikan. Ini mungkin terkesan klise, tetapi justru di sinilah letak persoalan yang tak kunjung kita carikan jalan keluarnya. Mengenali properti-properti kebudayaan lain (suku dan bangsa), seperti belajar berbahasa dan berseni daerah lain, meskipun sudah ada bahasa pengantar, ternyata efektif untuk membangun solidaritas bersama. Keinginan kita belajar dengan sungguh-sungguh apa yang terjadi di Tanah Papua dan memahami

keberagaman budaya di Bumi Cenderawasih ini menjadi kata kunci untuk melahirkan pengelolaan kebudayaan yang emansipatif.

Dalam konteks Papua, dalam kasus pembentukan nasionalisme dan sejarah (bahasa) Indonesia yang sebenarnya lahir dari efek-efek antara persentuhan dunia lama dan dunia baru. Dalam hal ini, James T. Siegel (1997:7) menjelaskan bahwa sejarah Indonesia terbuat bukan dari sumber-sumber asli dan juga bukan dari pinjaman asing, tetapi dari efek koneksi- koneksi antara keduanya. Wacana kebudayaan sering diam-diam memuat jejak (hirarki) kuasa kolonial yang diskriminatif dan laten. Misalnya kita cenderung meresmikan tata cara meja makan, yang lebih Indo-Belanda, dari pada lesehan yang lebih bebas. Sementara itu, sejarah membuktikan bahwa nasionalisme Indonesia tidaklah semata-mata tumbuh dari perlawanan anti penjajah. Oleh karena itu, untuk menjadi Indonesia orang harus pertama-tama merasakan arus-arus komunikasi dunia (Siegel, 1997:93). Dengan demikian Indonesia menjadi ruang (wacana) antara kini dan masa revolusi yang lalu; antara dunia baru dan dunia lama; antara kegiatan-kegiatan pertanian dan industri; antara kampung-kampung dan kota. Indonesia adalah ruang antarpulau, antar-sukubangsa, antarbahasa, bahkan antarbenua dan antarkala/zaman.

Efek-efek persentuhan antara dunia lama (tradisional) dan dunia

baru (global) itu pulalah yang kemungkinan terjadi di Papua dalam usahanya mengkontruksi sejarah dan kebudayaannya. Pengelolaan kebudayaan mendapat permasalahan yang serius terkait dengan interkoneksi ini. Begitu banyak perbedaan yang dibawa oleh kebudayaan tradisional dan global untuk dikelola. Meskipun kebudayaan itu cair dan lentur dan bisa dengan cepat beradaptasi dan “memantas-mantaskan” dirinya dengan dunia baru, namun kepentingan ekonomi politis mempengaruhi kecairan kebudayaan tersebut sehingga akan menjadi kaku dan sangat hegemonik. Di Tanah Papua, kebudayaan (baru) yang lahir dari persentuhan dunia lama dan dunia baru (global) sudah terjadi dan menimbulkan berbagai implikasi. Namun hal itu adalah kejamakan terjadi dan sekaligus menjadi tantangan dan peluang bagi rakyat Papua untuk mengkonstruksi kembali pikiran dan identitas mereka yang selalu akan berubah tanpa henti.



Gambar 2.

Fenomena “kapal putih” yaitu kapal Pelni berbadan besar yang membawa para migran ke Tanah Papua

(Foto: I Ngurah Suryawan)

Interkoneksi Global dan Transformasi Sosial Budaya

Tidak terbantahkan bahwa seluruh wilayah di dunia ini telah terhubung melalui hubungan-hubungan pengetahuan, kapital dan sekaligus juga ide-ide tentang “kemajuan” yang dibawa oleh modernitas. Salah satu bentuk wujud modernitas tersebut adalah dalam bentuk pembangunan yang mentautkan (menghubungkan) orang-orang dengan imajinasi serta mimpi yang berbeda-beda. Namun di sisi yang lain, komunitas-komunitas suku bangsa menghadapi tantangan untuk mengambil bagian dalam perubahan sosial budaya yang berlangsung di tanah mereka. Tantangan terbesarnya adalah bagaimana komunitas lokal ini dalam merespon dan menyikapi penetrasi global yang menyerang mereka.

Sebenarnya komunitas-komunitas suku asli atau tempatan di Indonesia dan di negara lainnya menghadapi tantangan yang lebih besar dibandingkan komunitas non-asli. Komunitas non-asli ini adalah para migran yang menyebar ke berbagai wilayah di negeri ini. Mereka, para migran ini, secara keseluruhan lebih dominan, lebih besar, dan lebih terorganisir lebih baik dalam menghadapi enam kecenderungan global. Enam kecenderungan itu adalah: krisis ekonomi, proses militerisasi, krisis negara, penyangkalan terhadap hak-hak manusia dan identitas kultural, konflik atas sumber daya alam, serta masalah sains dan teknologi yang

lolos dari kendali. Masalah-masalah yang menimpa minoritas suku asli adalah: pemindahan, pemiskinan budaya dan sosial serta disintegrasi akibat tuntutan dari luar atas sumber daya alam di sekitarnya.

Penetrasi modal yang eksploitatif ke dalam perekonomian suku asli seringkali justru didukung oleh negara dengan alasan ingin memajukan kaum minoritas suku asli melalui program-program perubahan sosial yang terarah (Ghee dan Gomes 1993:1 -3). Corak kehidupan suku-suku asli telah dilihat sebagai hasil hubungan variabel bebas dengan variabel tergantung dengan pusat perhatian pada kehidupan suku asli yang perlakuan sebagai variabel tergantung, sehingga program pembangunan dilihat dari perspektif suku asli. Oleh karena itu di sana tidak dihasilkan “model alternatif” yang relevan dengan upaya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah yang berupaya meningkatkan kesejahteraan hidup rakyatnya...pusat perhatian harus digeser dari yang berpusat pada kehidupan suku asli ke hubungan antara pemerintah atau Negara dengan suku asli melalui garis hubungan pembangunan” (Suparlan 1993:xii).

Dalam bayangan Suparlan (1993) hubungan-hubungan itu terwadahi secara hirarkis sesuai konteksnya dalam hakikat Negara yang berupa masyarakat majemuk dan menghasilkan satuan-satuan perantara yang fungsional dalam mengakomodasi perbedaan-

perbedaan dan konflik-konflik menjadi menguntungkan kedua belah pihak. Katanya model perantara ini dapat berguna untuk membentengi kehidupan suku asli dari penetrasi langsung yang dilakukan oleh pemerintah karena di sana kepentingan-kepentingan dan hirarki yang berbeda-beda yang berasal dari pemerintah/pihak luar dan dari suku asli dapat diakomodasi. Penetrasi pemerintah dan system perekonomian yang kapitalistik dan eksploitatif pun melalui model perantara itu secara bertahap dapat diserap oleh komunitas suku asli.

Persoalan klasik dari model perantara yang diusulkan oleh Parsudi Suparlan, setelah penetrasi kapital itu dianggap sebagai nasib yang tak terhindarkan, adalah siapakah yang menanggung beban “biaya” bagi para perantara itu? Bukankah demi efisiensi dan hubungan yang saling menguntungkan itu, mata rantai dari asal sumber daya (produsen) dan para pengguna sumber daya (konsumen) malah perlu diperpendek agar biaya membengkak (komplikasi/siasat tipu muslihat) karena panjangnya mata rantai distribusi dapat dikurangi? Mana yang lebih menguntungkan para warga komunitas tempatan (asli), investasi asing itu langsung tanpa perantara ataukah pakai perantara? Jika pakai perantara, berapa panjang matarantainya? Bukankah hampir dalam semua kasus beban perantara itu selalu lebih berat

dipikul oleh mereka yang lemah, yaitu para warga tempatan, karena para perantara itu cenderung memihak yang kuat dan menguntungkan dirinya? Mungkinkah persoalan-persoalan ini dijawab atau dihindari oleh para warga komunitas tempatan?

Masyarakat tempatan adalah komunitas yang dinamis dan selalu berubah, bahkan juga tidak selalu terisolir. Dinamika yang terjadi adalah interaksinya adalah merupakan bagian dari hidup masyarakat setempat yang telah melampaui masa panjang dengan perspektif yang tidak selalu tempatan. Di sini kita harus memahami budaya masyarakat setempat pun pernah mengalami kontak dengan dunia luar, namun dalam proses itu “warna” tempatan kuat bertahan karena masyarakat berhasil mengidentifikasi dirinya dalam proses itu. Mereka dapat mengontrol sejarahnya sendiri, yang mampu membuat sejarahnya sendiri atau menghadirkan waktu transendennya sendiri.

Kolonialisme mungkin dapat dikatakan sebagai biang keladi yang memutuskan proses pengontrolan sejarah yang dilakukan oleh masyarakat itu. Tetapi itu pun hanya benar untuk sebagian karena dampak kolonialisme di Indonesia beragam dan juga karena adanya dualisme kebijakan kolonial di negeri jajahan. Ketika itu, terutama sepanjang pemerintahan Hindia Belanda, masyarakat pribumi diberi ruang tersendiri yang praktis terpisah

dengan masyarakat Eropa dan migran lain, sehingga terjadi masyarakat plural di mana seluruh segmen hidup dalam dunianya sendiri. Mereka bertemu hanya di pasar dan bersatu di bawah kuasa pemerintah kolonial. Di bidang hukum misalnya, masyarakat pribumi diurus oleh hukum adatnya, sehingga para kepala adat punya wewenang memutuskan perkara. Sementara warga Eropa punya hukumnya sendiri. Sekarang dualisme di bidang hukum ini secara formal habis. Itupun bukan semata-mata akibat proses pembangunan karena sudah dimulai sejak diberlakukannya UUDS 1950. Hal ini secara jelas menunjukkan bahwa kita perlu melihat patahnya kekuatan masyarakat tempatan itu secara lebih historis.



Gambar 3.

Mall dan jaringan hotel internasional sudah tumbuh subur di Tanah Papua yang menandakan introduksi pembangunan dan investasi global telah menajal

(Foto: I Nguhah Suryawan)

Dove (1985) mengungkapkan, bahwa puncak perubahan itu terjadi

ketika bangsa Indonesia menerapkan konsep pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi. Katanya, pembangun di Indonesia telah diartikan sebagai perubahan yang dikehendaki dan dibutuhkan, sehingga apa saja yang dianggap kuno dan tidak mengalami perubahan dengan sendirinya dianggap keterbelakangan, termasuk kebudayaan tradisional komunitas tempatan yang dipandang sebagai penghalang proses pembangunan, yang diartikan secara sempit sebagai modernisasi. Pembangunan itu dengan demikian identik dengan kesadaran baru yang hadir dan diterima lepas dari budaya tempatan. Oleh sebab itulah maka terjadi proses *kedua* yaitu merasuknya pembangunan dalam kesadaran kita bukan sebagai sintesa proses historis budaya-budaya tempatan, tetapi lewat daya pikat citra suksesnya di negeri-negeri industri maju yang didukung kekuatan modal. Negara-negara inilah yang selalu menjadi contoh dari suksesnya pembangunan.

Tentu saja dan benar kita ingin sukses. Persoalannya yang terjadi adalah, bahwa kita baru dapat memeluk citranya (bukan/belum suksesnya) tetapi telah melepas pegangan kita pada pengetahuan budaya yang telah lama kita bangun. Kondisi di pelosok dan pedalaman tampak bahwa degradasi sumber-sumber daya alam dan pengetahuan setempat selalu diiringin dengan peningkatan konsumerisme yang digerakkan oleh pesona mode di

sektor konsumtif dan bermuara pada krisis identitas dan disintegrasi sosial. Warga masyarakat tempatan pun ikut-ikutan mengeksploitasi/merusak alam yang jadi ibu pertiwinya. Banyak orang akhirnya menjadi positivistik, padahal sumber-sumber daya alam dan pengetahuan tempatan kita itu terbatas dan telah terkait dengan tradisi sehingga tidak mungkin memuaskan pikiran macam itu, kecuali jika kondisi masyarakat tempatan ini dilupakan atau dianggap tidak ada.

Kondisi ini sebenarnya merefleksikan bahwa tersingkirnya masyarakat tradisional itu tidak semata-mata merupakan hilangnya keaslian kebudayaan tradisional masyarakat tempatan, tetapi merupakan soal hilangnya pribadi dan rasa percaya diri masyarakat tempatan dan juga masyarakat kita pada umumnya. Hal ini dengan gamblang menunjukkan betapa kita menjadi tergantung pada suatu proses yang sumber-sumber kekuatannya dari luar kuasa kita. Pada titik inilah pemerintah (pusat) terpaku dan kehilangan dinamikanya. Perlunya partisipasi sesama warga sebagai partner menjalani pembangunan pun sering dianggap tidak ada. Lingkungan alam dan komunitas-komunitas tempatan kemudian dijadikan semata-mata sebagai garis depan yang harus ditaklukkan dan bukan sebagai partner menjalani sejarah.

Pada momen seperti inilah menjadi sangat penting mentautkan imajinasi (bayangan) akan perubahan

sosial yang dimimpikan oleh masyarakat tempatan dengan gerakan untuk inisiatif perubahan dalam diri sendiri. Hal ini sangatlah penting untuk menumbuhkan kepercayaan diri masyarakat untuk tetap berada dan berjuang di tengah deru perubahan sosial yang perlahan namun pasti berada di depan kehidupan mereka. Kondisi transformasi sosial-budaya yang terjadi memaksa masyarakat untuk mengambil respons atau menanggapi situasi yang terjadi. Pada situasi inilah sangat diperlukan usaha-usaha dalam memediasi kemandirian dan imajinasi masyarakat untuk selalu terlibat dalam perubahan sosial yang terjadi di lingkungannya. Masyarakat terlibat bukan hanya sebagai penonton namun sebagai subjek yang menentukan arah perubahan, terutama perubahan yang diinginkan oleh dirinya sendiri sebelum berlangsung di tengah masyarakat yang lebih luas.

Dalam konteks Papua, memediasi kesadaran ini tentu saja menghadapi tantangan yang luar biasa. Tantangan itu bersumber kepada situasi keterpecahan yang terjadi di tengah masyarakat akibat dari pembangunan seperti yang telah disebutkan di atas. Selain itu, situasi ketergantungan dan kehilangan kepercayaan diri juga menjadi situasi yang rumit untuk menguraikan akar dari persoalan yang terjadi di masyarakat. Situasi ketergantungan terhadap berbagai macam “bantuan” dan akses

ekonomi politik juga membuat masyarakat hanya terlibat dalam lingkaran yang “mematikan” untuk melakukan inisiatif perubahan sosial dalam dirinya sendiri. Kondisi ini tentu saja sangat mengkhawatirkan.

Dalam kasus Papua, program-program pembangunan telah menghubungkan berbagai macam latar belakang orang Papua dengan dunianya masing-masing. Di tengah proses inilah menjadi penting memperhatikan pergerakan orang-orang Papua dalam dinamika pembangunan di Tanah Papua yang mentautkan identitas dirinya dengan dunia global. Dalam konteks ini, memahami imajinasi orang Papua tentang diri dan lingkungannya memerlukan pemahaman tentang detail keterhubungan dan siasat-siasat mereka dalam merespon pembangunan dalam bentuk berbagai macam program dan tawaran “pemberdayaan” yang dilakukan oleh negara.

Mengacu kepada kondisi keterhubungan dan siasat-siasat orang Papua ini, Pouwer dan Hannan (Timmer, 2011;2012) sejak dulu sudah mengungkapkan bahwa masyarakat Papua sejak dahulu kerap bergerak (*Peoples on the Move*) yang berkaitan dengan dinamika migrasi, peranan *kain timur* di wilayah kepala burung Papua, dan benda utama dalam pertukaran perkawinan.

Jika dikontekstualisasikan pada saat ini, keterhubungan orang-orang Papua dimediasi oleh instrumen-instrumen yang ditawarkan oleh negara berupa

pemekaran daerah, pendidikan, dan lembaga-lembaga modern terutama dalam birokrasi pemerintahan yang memungkinkan orang Papua untuk secara terus-menerus bergerak memperbaharui dirinya.

Namun di tengah kondisi yang “melumpuhkan” di tataran pemerintahan itu, bagaimanapun pembangunan yang terjadi di Tanah Papua telah menghubungkan dan sekaligus memungkinkan orang Papua untuk memikirkan tentang posisi dirinya dalam dunia yang sedang berubah. Pada momen-momen inilah orang Papua dapat berpikir melampaui batas-batas budayanya dan dapat bersatu demi kepentingan-kepentingan tertentu. Namun sudah pasti tantangan yang harus dihadapi, terkhusus dalam salah satu konteks pembangunan yaitu pemekaran daerah, adalah kecenderungan kebanyakan orang Papua yang berjuang atas nama pemekaran ini untuk kembali mengidentifikasi diri mereka sebagai bagian dari sejumlah kelompok tertentu yang biasanya terkait dengan kelompok etnik dan marganya.

Imajinasi tentang identitas-identitas baru yang sekarang sedang berkembang di Tanah Papua hanya akan mungkin berkembang baik jika orang-orang Papua berpikir melampaui kebudayaan etniknya dan mempertautkan dirinya dengan dunia global. Perspektif lintas batas sangat memungkinkan karena Papua sudah terkoneksi dengan dunia global dan merangsang sebuah

inisiatif dialog lintas batas dalam memperbarui wawasan orang Papua tentang identitas dan posisinya dalam dunia global.

Penutup

Membaca kompleksitas persoalan di Tanah Papua, antropologi dituntut perannya untuk memberikan senjata atas “kekalahannya” masyarakat tempatan di Indonesia yang didesak ke “pedalaman” akibat jejaring interkoneksi kekuatan kapital global yang maha dahsyat. Ini untuk menunjukkan bahwa antropologi adalah ilmu yang membumi, bekerja bersama-sama warga komunitasnya, berproses bersama, baik si antropolog maupun warga komunitasnya, untuk bersama-sama membangun penafsiran dan secara lebih luas membangun sejarah (baru).

Sangat penting sekali mengubah perspektif kebudayaan dalam menafsirkan subjek yang terus-menerus berubah, seperti pemahaman kebudayaan yang merupakan sistem makna yang dikonstruksi oleh manusia. Metodologi yang reflektif dalam menafsirkan kebudayaan adalah membuka jalan penelitian alternatif transformatif partisipatoris. Penelitian ini melibatkan si peneliti secara partisipatoris ke dalam subjek penelitiannya. Partisipasi observasi dilakukan untuk membangun argumentasi dan teori dari data-data lapangan yang diperoleh si peneliti bersama dengan

subjek penelitiannya (Laksono, 2009: 3-4).

Antropolog menggunakan metodologi reflektif dengan bersama-sama subjek penelitian membangun pola relasi untuk bersama-sama merumuskan persoalan yang terjadi dan memberikan argumentasinya. Metode penelitian ini tergolong penelitian alternatif transformatif partisipatoris yang percaya bahwa kenyataan itu bersifat partisipatif yang diciptakan oleh (hubungan) pikiran dan lingkungan yang ada. Inilah yang disebut dengan “subjektivitas kritis” yang terjadi melalui transaksi partisipatoris dengan lingkungan. Metode penelitian etnografi yang akan dihasilkan dalam penelitian ini memuat proses reflektif daripada temuan bebas nilai yang objektif. Dalam bahasa Laksono (2009: 4), peneliti maju bersama komunitas yang ditelitinya dalam suatu proses sosial- budaya menjalin sejarah (baru). Dengan demikian, metodologi penelitian ini menjadikan studi antropologi menjadi bagian dari gerakan sosial komunitasnya dan dituntut berpartisipasi dalam menciptakan sejarah yang menyatu dengan komunitas tempatan di mana studi berlangsung.

Dalam ranah praksis, kerja antropologi reflektif mesti dikerjakan secara berkelanjutan dengan mengapresiasi pengalaman-pengalaman dan narasi reflektif identitas yang berbeda-beda. Penting juga diajukan kerja

partisipatoris bersama-sama masyarakat tempatan untuk melakukan studi etnografi bersama yang memberikan ruang dan sekaligus mengapresiasi pengalaman-pengalaman masyarakat tempatan untuk bersiasat di tengah terjangan kekuatan kapital global. Oleh karena itulah menjadi penting untuk menghargai “ruang antar budaya” untuk menumbuhkan kesadaran keberbedaan, melihat identitas diri kita pada masyarakat tempatan lain yang sebelumnya “asing” atau kita anggap “terkebelakang” dibanding identitas budaya kita.

Antropologi, dengan pendekatan reflektif yang transformatif memang tidak akan pernah bebas nilai. Antropologi reflektif lahir bersama-sama rakyat untuk berpolitik dalam membangun sejarah baru. Oleh karena itulah, antropologi reflektif yang mendasarkan dirinya pada gerakan sosial, bekerja bersama-sama untuk menemukan “diri masyarakat” dan juga “diri si antropolog”. Kerja antropologi yang hanya “mengatasnamakan rakyat” akan tercerabut dari refleksi masyarakat tempatan yang ditelitinya. Penafsiran yang dihasilkannya hanya akan memantik relasi kekuasaan dan kekerasan.

Daftar Pustaka

- Giay, Benny. 2000. *Menuju Papua Baru: Beberapa Pokok Pikiran sekitar Emansipasi Orang Papua*. Jayapura: Deiyai/Els-ham Papua.
- Laksono, P.M. 2009. *Peta Jalan Antropologi Indonesia Abad Kedua Puluh Satu: Memahami Invisibilitas (Budaya) di Era Globalisasi Kapital*. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 27 Oktober 2009.
- Laksono, P.M. 2010. *Kontekstualisasi (Pendidikan) Antropologi Indonesia*. Makalah dalam Sarasehan AJASI (Asosiasi Jurusan Antropologi Seluruh Indonesia) di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Laksono, P.M. 2010b. *Mewacanakan Pemberdayaan Masyarakat dalam Antropologi*. Makalah dalam Kongres Asosiasi Antropologi Indonesia ke-3 dan Seminar Antropologi Terapan di Cisarua 21-23 Juli 2010.
- Laksono, P.M. 2011. *Ilmu-ilmu Humaniora, Globalisasi, dan Representasi Identitas*. Pidato yang disampaikan pada Peringatan Dies Natalis ke-65 Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 3 Maret 2011.
- Putra, Heddy Shri Ahimsa. 1987. “Etnografi sebagai Kritik Budaya: Mungkinkah di Indonesia?”. *Majalah Jerat*

- Budaya* No 1/1/1987 Jurusan Antropologi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Suryawan, I Ngurah. 2011a. "Antropologi Gerakan Sosial: Membaca Transformasi Identitas Budaya di Kota Manokwari, Papua Barat" dalam *Humaniora, Jurnal Budaya, Sastra, dan Bahasa* Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta Volume 23, Nomor 3, Oktober 2011 (290-300).
- Suryawan, I Ngurah. 2011b. "Komin Tipu Komin: Elit Lokal dalam Dinamika Otonomi Khusus dan Pemekaran Daerah di Papua" dalam *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JSP)* Volume 15, Nomor 2, November 2011 (140-153).
- Suryawan, I Ngurah. 2012a. "Politik Ruang (Pasar) dan Pemekaran Daerah: Siasat Rakyat Papua di Garis Depan Global" dalam *Kritis, Jurnal Studi Pembangunan Interdisipliner* Vol. XXII No. 1 Februari – Juli 2012.
- Suryawan, I Ngurah. 2012b. *Jiwa Yang Patah*. Yogyakarta: Pusat Studi Bahasa dan Budaya Papua (Pusbahaya) UNIPA Manokwari, Papua Barat dan Penerbit Kepel.
- Suryawan, I Ngurah. 2013. "Tanah Dibutuhkan Tapi Orang Tidak: Transformasi Masyarakat Adat dalam Perspektif Etnografi dan Sejarah Sosial" dalam *Kritis, Jurnal Studi Pembangunan Interdisipliner* Vol. XXII No. 2 Juli – Desember 2013.
- Tebay, Neles. 2009. *Dialog Jakarta-Papua Sebuah Perspektif Papua*. Jakarta: SKP Jayapura.
- Timmer, Jaap, 2007, "Desentralisasi Salah Kaprah dan Politik Elit di Papua", dalam Henk Schulte Nordhold dan Gerry van Klinken (eds.), *Politik Lokal di Indonesia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hal. 595-625
- Timmer, Jaap. 2013. "Menentang Kulturalisme di Tanah Papua" dalam I Ngurah Suryawan, *Jiwa yang Patah*. Yogyakarta: Kepel Press dan Pusat Bahasa dan Budaya Papua UNIPA Manokwari.
- Tsing, Anna Lowenhaupt. 2005. *Friction: An Ethnography of Global Connection*. Princeton and Oxford: Princeton University Press.
- Tsing, Anna Lowenhaupt. 1998. *Di Bawah Bayang-Bayang Ratu Intan: Proses Marjinalisasi pada Masyarakat Terasing*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Widjojo, Muridan., dkk. 2009. *Papua Road Map: Negotiating the Past, Improving the Past and Securing the Future*. Jakarta: Buku Obor, LIPI dan TIFA.